

***THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, AND SUPERVISION
ON VALUE FOR MONEY-BASED BUDGET PERFORMANCE THROUGH
INTERNAL CONTROL SYSTEMS
(A CASE STUDY OF THE KARAMA RIVER BASIN MANAGEMENT AGENCY IN
MAMUJU REGENCY)***

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN
TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERBASIS VALUE FOR MONEY
MELALUI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
(STUDI KASUS PADA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
(DAS) KARAMA KABUPATEN MAMUJU)**

Yovico Dian Hutama¹, Wahyu Maulid Adha², Muhtar Sapiri³

Program Studi Magister Manajemen Universitas Terbuka^{1,2,3}

mr.yovicodiahutama@gmail.com¹, wahyuadha@unsulbar.ac.id²,

muhtar.sapiri@universitasbosowa.ac.id³

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the influence of accountability, transparency, supervision, and internal control systems on value-for-money-based budget performance. The analysis of the influence of accountability, transparency, and supervision on value-for-money-based budget performance was mediated by the internal control system at the Karama Watershed Management Center, Mamuju Regency. This study used a quantitative approach with data collection through questionnaires. SmartPLS 3.2.9 was used as the data analysis technique. The results showed that accountability significantly improved value-for-money-based budget performance at the Karama Watershed Management Center, Mamuju Regency. Transparency plays a significant role in improving value-for-money budget performance. Consistent and comprehensive oversight has also been proven to support optimal budget performance. The internal control system plays a significant role in strengthening the implementation of value-for-money budgets. Accountability not only has a direct impact but also indirectly improves budget performance through the internal control system. Transparency also influences budget performance, mediated by the internal control system. Oversight influences value-for-money budget performance, mediated by the internal control system as a supporting mechanism.

Keyword: Accountability, Transparency, Oversight, Internal Control System, And Value-For-Money Budget Performance

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja anggaran berbasis nilai untuk uang. Analisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis nilai untuk uang dimediasi oleh sistem pengendalian internal di Pusat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Karama, Kabupaten Mamuju. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner. SmartPLS 3.2.9 digunakan sebagai teknik analisis data. Hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas secara signifikan meningkatkan kinerja anggaran berbasis nilai uang di Pusat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Karama, Kabupaten Mamuju. Transparansi juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja anggaran berbasis nilai uang. Pengawasan yang konsisten dan komprehensif terbukti mendukung kinerja anggaran yang optimal. Sistem pengendalian internal memainkan peran signifikan dalam memperkuat implementasi anggaran nilai untuk uang. Akuntabilitas tidak hanya memiliki dampak langsung tetapi juga secara tidak langsung meningkatkan kinerja anggaran melalui sistem pengendalian internal. Transparansi juga mempengaruhi kinerja anggaran, dimediasi oleh sistem pengendalian internal. Pengawasan mempengaruhi kinerja anggaran nilai untuk uang, dimediasi oleh sistem pengendalian internal sebagai mekanisme pendukung.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kinerja Anggaran Nilai Untuk Uang

PENDAHULUAN

Sejalan dengan adanya otonomi daerah maka timbul konsekuensi logis berupa tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan praktik keuangan yang sehat (*good governance*). Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di masa otonomi daerah ini adalah dengan memberlakukan sistem penganggaran berbasis kinerja, yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal. Atau dengan kata lain suatu pendekatan penyusunan anggaran yang memiliki orientasi pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai. Penganggaran berbasis kinerja ini dimulai dengan perencanaan, yang berisi komitmen mengenai kinerja yang nantinya akan dihasilkan, kemudian penjabaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan. Ciri utama dalam penganggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil yang diharapkan (*outcomes*) sehingga dapat memberikan sebuah informasi tentang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan.

Konsep *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang digunakan sebagai indikator untuk menilai suatu lembaga telah mendapatkan manfaat yang maksimum (*the maximum benefit*) dari barang dan/atau jasa yang tersedia atau dimiliki. Oleh karena itu, *value for money* digunakan untuk melihat belanja pemerintah dapat memberikan manfaat yang maksimum atau tidak. (Khusaini et al., 2021:27) Prinsip *value for money*

mutlak dilakukan guna kelangsungan dan perkembangan organisasi karena berkaitan erat dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat banyak, sehingga sangat diperlukan adanya sistem pengendalian intern. Teori Lathifah (2021) bahwa sistem pengendalian intern adalah salah satu rencana organisasi dan metode bisnis dalam rangka menjaga dan menyediakan informasi yang akurat, andal dan memadai dalam rangka mendorong perbaikan efisiensi operasional organisasi.

Keterbukaan atau transparansi sangat berpengaruh dalam pengelolaan kinerja anggaran, pernyataan ini dikutip dari Amin *et al.*, (2022) bahwa semakin transparan pengelolaan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja anggaran berkonsep *Value for money*, dimana keterbukaan pemerintah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak membutuhkan, dalam pengelolaan anggaran yang berorientasi ekonomi, efisien dan efektivitas dapat meningkatkan capaian suatu kegiatan, program, dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan pemerintah.

Tercapainya pengelolaan anggaran demi mencapai kinerja anggaran yang baik, tentu tidak lepas dari adanya pengawasan dalam penyusunan maupun penggunaan anggaran, sebagaimana dikutip dari Nurhotimah (2021:10) bahwa pengawasan atau *controlling*, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan memaksimalkan kegiatan atau aktivitas pemerintahan (Veronika dan Nugraeni, 2023). Pengawasan yang baik terhadap kinerja anggaran akan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Penelitian Rachmadi *et al.*, (2023) bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Sedangkan penelitian Hawa dan Fitriasuri (2024) ditemukan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Pengawasan yang baik memainkan peran penting dalam efektivitas sistem pengendalian internal dalam organisasi, Sudjono dan Setiawan (2022) mengemukakan bahwa pengawasan membantu organisasi memantau kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan standar etika, mencegah penipuan, kesalahan, dan pelanggaran lainnya oleh karyawan. Pengawasan juga membantu memastikan bahwa sistem pengendalian intern berfungsi sesuai yang diharapkan dan memberikan keyakinan yang wajar kepada pemangku kepentingan.

Novrianti *et al.*, (2022) menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak dapat memediasi pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran. Sari *et al.*, (2021) menemukan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Kemudian Jatmiko *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja *value for money*. Penelitian mengenai kinerja anggaran berbasis *value for money* telah banyak dilakukan pada instansi pemerintahan, dengan fokus utamanya yang terletak pada bagaimana prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis diterapkan dalam pengelolaan anggaran. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh penting dalam menciptakan kinerja anggaran yang optimal.

Kemudian dari sisi pengawasan juga sering dikaitkan dengan peran strategis dalam mencegah penyimpangan anggaran. Sistem pengendalian intern juga telah dibahas sebagai elemen penting yang juga dapat memperkuat pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kinerja anggaran. Namun, sebagian besar peneliti sebelumnya yang telah meneliti pada instansi pusat atau pemerintah daerah secara umum. Sebagian besar penelitian sebelumnya belum secara spesifik meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* melalui sistem pengendalian intern sebagai variabel mediasi. Kemudian dalam peneliti sebelumnya yang masih kurang melakukan penelitian di instansi teknis di daerah seperti Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), padahal instansi semacam ini juga memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran negara, selain itu belum banyak riset yang membahas implementasi *value for money* pada sektor teknis kehutanan dan lingkungan hidup, khususnya pada tingkat balai atau unit pelaksana teknis di wilayah seperti Kabupaten Mamuju.

Penelitian ini penting dan memiliki kebaruan (*novelty*), karena menggabungkan tiga faktor utama yaitu akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dalam satu model analisis terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*, dengan mempertimbangkan sistem pengendalian intern sebagai variabel mediasi. Kemudian dalam penelitian ini difokuskan pada Balai Pengelolaan DAS Karama sebagai unit pelaksana teknis di daerah yang juga memberikan sudut pandang baru yang belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya. Dengan begitu maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola anggaran di instansi teknis pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan dan kehutanan.

Obyek penelitian ini ditentukan pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karama yang berada di Kabupaten Mamuju, yang mempunyai visi yakni terwujudnya pengelolaan sumber daya air di WS Kalukku – Karama secara adil, menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dengan mendorong peran pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat.

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Belanja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karama Tahun 2020-2023

Tahun	Target Belanja (%)	Realisasi Belanja (%)	Selisih Belanja (%)
2020	46.527.022.000	45.953.479.553	98,77
2021	44.218.529.000	43.066.385.825	97,39
2022	44.559.246.000	41.924.738.452	94,09
2023	33.687.997.000	33.451.598.891	98,30

Sumber : Data sekunder, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 yaitu data belanja tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2023 yang diperoleh dari kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karama yang menunjukkan bahwa dalam konteks *value value money* yang mengindikasikan bahwa realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan, hal ini dapat dilihat bahwa ketercapaian target anggaran belanja dalam 4 tahun terakhir dalam penyusunan anggaran belanja (2020-2023) dengan 94,09% - 98,77%.

Berdasarkan permasalahan yang ada, perlu dilakukan evaluasi dengan prinsip *Value for Money* dengan penerapan 3E, yakni (1) Ekonomi, yang mengukur kesesuaian antara anggaran

yang direncanakan dengan yang direalisasikan; (2) Efisiensi, yang mengukur pelaksanaan operasional dan penggunaan anggaran dalam satuan kerja; dan (3) Efektivitas, yang mengukur pencapaian target-target program sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran. Penerapan *value for money* dinilai sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Semakin cepat penyerapan anggaran, semakin cepat pula manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah.

1. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Menurut Lane dalam Halim et al. (2006), teori keagenan relevan untuk diterapkan dalam organisasi sektor publik. Permasalahan keagenan dalam pemerintahan dapat terjadi antara eksekutif dan legislatif, maupun antara legislatif dan publik. Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif berperan sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal. Dalam konteks ini, legislator berupaya mempertahankan dukungan politik agar terpilih kembali dengan mencari program atau proyek yang dapat meningkatkan popularitas di mata konstituen.

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dipandang sebagai alat atau instrumen yang digunakan oleh pemerintah, bukan hanya dalam konteks government yang berfokus pada aparatur negara, tetapi juga dalam makna governance yang menekankan pada tata kelola sumber daya publik. Secara esensial, kebijakan merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang mengatur pengelolaan serta distribusi sumber daya alam,

keuangan, dan manusia untuk kepentingan masyarakat luas.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (Lembaga eksekutif pemerintah, Lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya (Sawir, 2022:1).

Transparansi

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi (Edowai *et al.*, 2021:29).

Pengawasan

Konsep pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen.

Pengawasan merupakan suatu usaha yang sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat apakah sumber daya manusia yang digunakan dapat berguna seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan (Sururama & Amalia, 2020:17).

Sistem Pengendalian Intern

Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau *internal control* diartikan sebagai proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal diartikan Minhajuddin (2023:83) sebagai sebuah proses yang integral dalam bentuk tindakan dan kegiatan yang diterapkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pimpinan organisasi dan seluruh pegawai dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien, laporan keuangan yang andal, mengamankan aset negara serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kinerja Anggaran

Anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Anggaran sektor publik bersifat terbuka tidak seperti disektor swasta yang bersifat tertutup. Anggaran sektor publik bersifat blue print organisasi tentang program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan. Secara konsep anggaran sektor publik bahwa ada perbedaan antara anggaran dan penganggaran. Yang mana Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan Penganggaran adalah proses/metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Sarsiti, 2022).

Value for Money

Pengukuran utama kinerja pada organisasi sektor publik adalah *value for money*. Penilaian kinerja pemerintah tidak bertumpu oleh hasil *output*, tetapi wajib menimbang *input*, *output*, serta result dengan serentak. Konsep *value for money* mengacu pada prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas (Mahmudi, 2020). Kekuatan organisasi sektor publik meminimalkan sumber daya yang diperguna-kan, menghindari pengeluaran konsumtif dan kurang berguna merupakan maksud dari ekonomis. Perbandingan masukan dan keluaran yang berkaitan dengan target yang ditetapkan merupakan efisiensi. Dan tingkat tercapainya hasil program dengan target yang ditetapkan adalah cakupan dari efektivitas.

Hipotesis

- H₁ : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju.
- H₂ : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju.

- H₃ : Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju.
- H₄ : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju.
- H₅ : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* dimediasi oleh sistem pengendalian intern pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju.
- H₆ : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* dimediasi oleh sistem pengendalian intern pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju.
- H₇ : Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* dimediasi oleh sistem pengendalian intern pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, karena untuk menguji teori dan hipotesis, penggunaan alat uji statistik serta angka-angka dengan pengolahan data statistik, bahkan mulai dari pengumpulan data, penafsiran data serta penyajiannya dilakukan dalam bentuk dan model angka-angka berdasarkan hasil olahan statistik pula (Arikunto, 2019). Adapun desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah

tipe *eksplanatori* yakni suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal atau sebab-akibat antara variabel penelitian yang digunakan melalui pengujian hipotesis yang telah diajukan sebelumnya yakni membahas mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* dimediasi oleh sistem pengendalian intern.

Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2020) populasi sebagai keseluruhan suatu obyek di dalam penelitian yang didalami dan juga dicatat segala bentuk yang ada di lapangan. Dimana populasi pada penelitian ini adalah pegawai pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sampel merupakan ukuran oleh nilai dan ciri yang dimiliki dari populasi (Arikunto, 2020). Sampel pada penelitian ini ditentukan sebanyak 49 orang pegawai atau responden. Sedangkan teknik penarikan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh, yakni penentuan sampel dengan mengambil keseluruhan jumlah populasi yang ada.

Instrumen Penelitian

Adapun instrument penelitian yang digunakan adalah berupa daftar pertanyaan (kuesioner/angket) secara terbuka untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden atas variabel yang diteliti, dimana persepsi tersebut dilakukan skala pengukuran yang merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif Sugiyono (2019:152-S154)

Skala likert merupakan teknik mengukur sikap dimana subjek diminta untuk mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidak setujuan mereka terhadap masing-masing pertanyaan.

D. Metode Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, agar data yang dikumpulkan dapat bermanfaat maka harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu, sehingga data tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian Wilayah Kerja Balai Pengelolaan DAS Karama

Secara geografis wilayah pelayanan Balai Pengelolaan DAS Karama memanjang dari arah Utara ke arah Selatan dengan batas sebelah utara adalah Propinsi Sulawesi Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Selatan, Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar. Wilayah pelayanan BPDAS Karama terletak pada 118045'25" - 12006'22"LS dan 1026'24" - 30 39'1" BT.

Tabel 4.1. SSWilayah Kerja Balai Pengelolaan DAS Karama Per Kabupaten

No	Kabupaten	Luas
1	Luwu Utara	203114.83
2	Majene	93211.51
3	Mamasa	140574.47
4	Mamuju	494803.51
5	Mamuju Tengah	293881.50
6	Mamuju Utara	137987.79
7	Pinrang	37334.02
8	Polewali Mandar	207340.58
9	Sigi	399.55
10	Tana Toraja	34.19
11	Toraja Utara	13774.81
Total		1622456.77

Sumber : Peta Batas DAS Nasional

Kondisi Biofisik Wilayah Pelayanan Balai Pengelolaan DAS Karama

Luas Wilayah Pelayanan Balai Pengelolaan DAS Karama berdasarkan Administrasi tercatat seluas 1.622.456,77 Ha. Terdiri dari 11 Kabupaten yang berada dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tengah. Perincian luasan wilayah BPDAS berdasarkan Luas dan Fungsi Kawasan tersebut disajikan pada Tabel 4.2. berikut ini :

Tabel 4.2. Luas Wilayah Pelayanan BPDAS Berdasarkan Luas dan Fungsi Kawasan

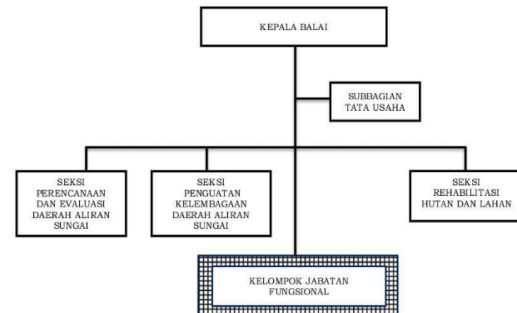
No	Fungsi	Luas
1	APL	493718.79
2	HL	480150.37
3	HP	74876.25
4	HPK	17517.31
5	HPT	366623.04
6	KSA/KPA	181177.91
7	TUBUH AIR	7563.35
8	No. Data	829.75
Total		1622456.77

Sumber: Peta Kawasan Hutan (Sk. 862/Menhut-II/2014)

Struktur Organisasi Balai Pengelolaan DAS Karama

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, maka Tugas Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) adalah melaksanakan Penyusunan Rencana dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Penguatan Kelembagaan, Konservasi Tanah dan Air serta Rehabilitasi Hutan, Lahan, Perairan Darat dan Mangrove sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bagan struktur organisasi

BPDAS sebagaimana tercantum pada Gambar 4.1. berikut ini:



Gambar 4.1. Struktur Organisasi BPDAS Karama

Hasil Penelitian

Deskripsi Responden

Deskripsi responden dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan responden yang menjadi sampel penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju yang berjumlah sebanyak 49 orang pegawai. Untuk mendapatkan gambaran responden mengenai keadaan responden maka peneliti melakukan penyebaran kuesioner. Untuk dapat memperoleh data maka peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 49 eksamplar kuesioner. Hal ini dapat disajikan interpretasi hasil penelitian yang diawali dengan identitas responden sebagai berikut:

a. Identitas Responden menurut Umur

Umur responden dapat menggambarkan tingkat pengalaman dan kedewasaan pola pikir dari responden dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-hari. Untuk lebih jelasnya akan disajikan identitas responden menurut umur yang dapat disajikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.3. Identitas Responden menurut Umur

No.	Umur	Frekwensi Responden	
		Dalam Orang	%

1.	21-30 tahun	5	10,2
2.	31-40 tahun	28	57,1
3.	41-50 tahun	13	26,5
4.	> 50 tahun	3	6,1
Total		49	100,0

Sumber : Data primer diolah (2025)

Tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa mayoritas pegawai Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju didominasi oleh pegawai yang berumur antara 31-40 tahun dengan persentase 57,1%, sedangkan persentase terkecil adalah pegawai yang berumur di atas 50 tahun dengan jumlah responden sebanyak 3 orang dengan persentase 6,1%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju adalah berumur sekitar 31-40 tahun.

Identitas Responden menurut Jenis Kelamin

Jenis kelamin mempengaruhi tingkat kinerja pegawai, dimana identitas responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini terdiri atas pria dan wanita. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.4. Identitas Responden menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekwensi Responden	
		Dalam Orang	%
1.	Pria	33	67,3
2.	Wanita	16	32,7
Total		49	100,0

Sumber : Data primer diolah (2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 49 orang responden yang diteliti, terlihat bahwa mayoritas pegawai pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju didominasi oleh pegawai pria yakni sebanyak 33 orang dengan persentase 67,3%, sedangkan sisanya adalah wanita dengan jumlah pegawai sebanyak 16 orang atau persentase 32,7%. Hal ini karena pria memiliki tingkat kinerja yang tinggi jika dibandingkan dengan wanita.

Identitas Responden menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan terakhir adalah jenjang pendidikan yang dimiliki oleh responden dalam penelitian ini dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi mulai dari jenjang SMA, D3, S1 dan S2. Untuk lebih jelasnya pengidentifikasian responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5. Identitas Responden menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

No.	Tingkat Pendidikan Terakhir	Frekwensi Responden	
		Dalam Orang	%
1.	SMA	1	2,0
2.	Diploma (D.3)	4	8,2
3.	Sarjana (S.1)	39	79,6
4.	Pasca Sarjana (S.2)	5	10,2
Total		49	100,0

Sumber : Data primer diolah (2025)

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa pegawai pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju adalah lulusan S1 sebanyak 39 orang dengan persentase 79,6%, sedangkan yang terendah adalah pegawai yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA yakni sebanyak 1 orang dengan persentase 2,0%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju lulusan sarjana, dimana semakin tinggi pendidikan seseorang maka berpengaruh terhadap pencapaian kinerja.

Identitas Responden menurut Status Pernikahan

Status responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan atas tiga kategori yakni menikah, belum menikah dan janda/duda. Hasil selengkapnya dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6. Identitas Responden menurut Status Pernikahan

No.	Status Pernikahan	Frekwensi Responden	
		Dalam Orang	%
1.	Menikah	45	91,8
2.	Belum Menikah	3	6,1
3.	Janda/Duda	1	2,0
	Total	49	100,0

Sumber : Data primer diolah (2025)

Berdasarkan tabel deskripsi responden menurut status pernikahan, maka mayoritas pegawai pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju berstatus sudah menikah yakni sebanyak 45 orang dengan persentase 91,8%, kemudian belum menikah yakni sebanyak 3 orang pegawai dengan persentase 6,1%, sedangkan yang berstatus janda/duda sebanyak 1 orang pegawai dengan persentase 2,0%. Berarti dapat dikatakan bahwa rata-rata pegawai pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju berstatus sudah menikah.

Identitas Responden menurut Masa Kerja

Masa kerja berkaitan jangka waktu pengabdian seorang responden pada suatu instansi tempatnya bekerja, dimana identitas responden berdasarkan masa kerja dapat disajikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.7. Identitas Responden menurut Masa Kerja

No.	Masa Kerja	Frekwensi Responden	
		Dalam Orang	%
1.	< 1 tahun	12	24,5
2.	2-5 tahun	7	14,3
3.	6-10 tahun	3	6,1
4.	> 10 tahun	27	55,1
	Total	49	100,0

Sumber : Data primer diolah (2025)

Berdasarkan tabel deskripsi responden menurut masa kerja, maka mayoritas masa kerja pegawai pada

Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju didominasi oleh pegawai yang memiliki masa kerja diatas 10 tahun yakni sebanyak 27 orang pegawai dengan persentase 55,1%, sedangkan masa kerja pegawai yang terendah adalah memiliki masa kerja antara 6-10 tahun yakni sebanyak 3 orang pegawai dengan persentase 6,1%. Hal ini berarti bahwa rata-rata pegawai yang bekerja pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju sudah berpengalaman.

Analisis Variabel Penelitian

Analisis deskripsi variabel penelitian yaitu suatu analisis yang memberikan gambaran mengenai persepsi atau tanggapan responden dari setiap butir pernyataan dalam masing-masing variabel penelitian yakni : akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis anggaran berbasis *value for money* melalui sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasil penentuan panjang kelas interval yang telah diuraikan, selanjutnya akan disajikan deskripsi variabel penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Persepsi Responden mengenai Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat baik itu keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dengan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik serta untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibannya sudah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil penyebaran kuesioner maka persepsi responden mengenai

akuntabilitas, dapat disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 4.8. Persepsi Responden mengenai Akuntabilitas

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	Mean
1	Saya menjalankan tugas sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.	0	0	13 26,5%	28 57,1%	8 16,3%	3,90
2	Saya menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan pekerjaan.	0	0	13 26,5%	23 46,9%	13 26,5%	4,00
3	Pimpinan dan staf bertanggung jawab dalam mengelola organisasi secara efisien.	0	0	10 20,4%	26 53,1%	13 26,5%	4,06
4	Kegiatan organisasi telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil terbaik dan biaya terendah.	0	0	11 22,4%	28 57,1%	10 20,4%	3,98
5	Keputusan dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan dapat dipertanggungjawabkan.	0	0	11 22,4%	22 44,9%	16 32,7%	4,10
Rata-Rata Skor Jawaban Responden							4,01

Sumber : Data primer diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.8 yakni deskripsi rata-rata tanggapan responden mengenai akuntabilitas pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju yakni sebesar 4,01, dan jika dilihat dari kriteria skor maka berada pada kisaran antara 3,40-4,20 dan dikategorikan tinggi. Ini berarti bahwa akuntabilitas sudah berjalan baik.

Persepsi Responden mengenai Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang akan dicapai, sehingga masyarakat atau publik serta pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas atas informasi-informasi yang diinginkan. Dari hasil penyebaran kuesioner maka persepsi responden mengenai transparansi, dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9. Persepsi Responden mengenai Transparansi

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	Mean
1	Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan telah disampaikan secara jelas dan akurat.	0	0	18 36,7%	22 44,9%	9 18,4%	3,82

2	Saya dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kebijakan dan pelaksanaan program.	0	8 16,3%	7 14,3%	24 49,0%	10 20,4%	3,73
3	Informasi keuangan dan kinerja organisasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.	0	0	16 32,7%	25 51,0%	8 16,3%	3,84
Rata-Rata Skor Jawaban Responden							3,80

Sumber : Data primer diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.9 yakni deskripsi rata-rata tanggapan responden mengenai transparansi pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju yakni sebesar 3,80, dan jika dilihat dari kriteria skor maka berada pada kisaran antara 3,40-4,20 dan dikategorikan tinggi. Ini berarti bahwa transparansi sudah berjalan baik.

Persepsi Responden mengenai Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk ditetapkannya ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang dapat diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dari hasil penyebaran kuesioner maka persepsi responden mengenai pengawasan, dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10. Persepsi Responden mengenai Pengawasan

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	Mean
1	Tersedianya sumber daya seperti SDM, anggaran, sarana yang cukup dalam mendukung kegiatan pengawasan.	0	0	21 42,9%	20 40,8%	8 16,3%	3,73
2	Pengawasan dilakukan secara sistematis dimulai dari perencanaan hingga pelaporan.	0	0	21 42,9%	18 36,7%	10 20,4%	3,78
3	Hasil pengawasan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja dan mencegah kesalahan secara berulang.	0	0	21 42,9%	17 34,7%	11 22,4%	3,80
Rata-Rata Skor Jawaban Responden							3,77

Sumber : Data primer diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.10 yakni deskripsi rata-rata tanggapan responden mengenai pengawasan pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju yakni sebesar 3,77, dan jika dilihat dari kriteria skor maka berada pada kisaran antara 3,40-4,20 dan dikategorikan tinggi. Ini berarti bahwa pengawasan sudah berjalan baik.

Persepsi Responden mengenai Sistem Pengendalian Intern

Tabel 4.11. Persepsi Responden mengenai Sistem Pengendalian Intern

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	Mean
1	Pimpinan dan pegawai telah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya sistem pengendalian intern.	0	1 2,0%	15 30,6%	31 63,3%	2 4,1%	3,69
2	Tujuan dan risiko dalam setiap kegiatan sudah ditetapkan secara jelas.	0	0	10 20,4%	25 51,0%	14 28,6%	4,08
3	Terdapat kebijakan dan prosedur yang mendukung dalam pencapaian tujuan keuangan.	0	0	17 34,7%	23 46,9%	9 18,4%	3,84
4	Informasi yang relevan dan dapat dipercaya telah tersedia dan mudah untuk diakses.	0	0	12 24,5%	20 40,8%	17 34,7%	4,10
5	Terdapat pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan.	0	0	8 16,3%	19 38,8%	22 44,9%	4,29
Rata-Rata Skor Jawaban Responden							4,00

Sumber : Data primer diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.11 yakni deskripsi rata-rata tanggapan responden mengenai sistem pengendalian intern pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju yakni sebesar 4,00, dan jika dilihat dari kriteria skor maka berada pada kisaran antara 3,40-4,20 dan dikategorikan tinggi. Ini berarti bahwa sistem pengendalian intern sudah berjalan baik.

Persepsi Responden mengenai Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*

Sistem pengendalian intern adalah untuk mengendalikan organisasi agar organisasi tetap berjalan dengan baik. Karena dalam organisasi perusahaan perlu di awasi kaitannya yaitu dengan asset organisasi. Dari hasil penyebaran kuesioner maka persepsi responden mengenai sistem pengendalian intern, dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* (VfM) adalah konsep penilaian kinerja sektor publik yang mengukur seberapa baik suatu organisasi dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (anggaran) secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dari hasil penyebaran kuesioner maka persepsi responden mengenai kinerja anggaran berbasis *value for money*, dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12. Persepsi Responden mengenai Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	Mean
1	Kegiatan dapat dilakukan dengan biaya yang rendah tanpa mengorbankan kualitas.	0	0	21 42,9%	20 40,8%	8 16,3%	3,94
2	Hasil kegiatan dapat dicapai dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya.	0	0	21 42,9%	18 36,7%	10 20,4%	4,35
3	Kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.	0	0	21 42,9%	17 34,7%	11 22,4%	4,73
Rata-Rata Skor Jawaban Responden							4,34

Sumber : Data primer diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.12 yakni deskripsi rata-rata tanggapan responden mengenai kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Balai Pengelolaan DAS Karama di Kabupaten Mamuju yakni sebesar 4,34, dan jika dilihat dari kriteria skor maka berada pada kisaran antara 4,20-5,00 dan dikategorikan sangat tinggi. Ini berarti bahwa kinerja anggaran berbasis *value for money* sudah berjalan sangat baik.

Pengujian Hipotesis Penelitian Menggunakan SEM PLS 3.2.9

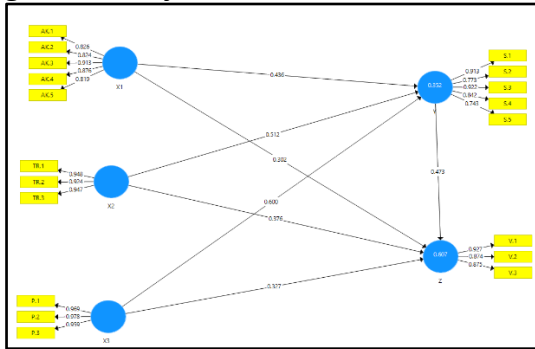
Tujuan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran *Value For Money* Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel mediasi pada Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karama Kabupaten Mamuju). Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat analisis berbasis *structural equation modeling* (SEM) yang diolah dengan aplikasi SmartPLS versi 3.2.9 Alasan memilih metode ini, karena didasari pada pertimbangan bahwa SEM-PLS 3.2.9 memiliki keunggulan adalah untuk menganalisis pengaruh antar konstruk laten yang kompleks

serta mampu menganalisis model dengan banyak variabel dan indikatornya.

Pengujian *outer model* dalam SmartPLS 3.2.9 bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk melalui serangkaian indikator. Validitas konvergen diuji dengan melihat nilai *loading factor* yang idealnya berada di atas 0,70 serta nilai *average variance extracted* (AVE) yang melebihi 0,50, mengindikasikan bahwa indikator mampu menjelaskan sebagian besar varians dari konstruk laten yang diukur. Sedangkan reliabilitas konstruk dilihat dari nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* yang masing-masing sebaiknya di atas 0,70 sebagai bukti konsistensi internal instrumen. Kemudian untuk memastikan bahwa setiap konstruk memiliki perbedaan yang jelas maka dilakukan uji validitas diskriminan menggunakan kriteria *forrell-larcker* dan analisis HTMT. Jika semua indikator memenuhi kriteria tersebut maka konstruk dinyatakan valid dan reliabel, sehingga layak digunakan dalam pengujian model struktural selanjutnya.

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, sebelum dilakukan analisis model pengukuran (*Outer Model*), terlebih dahulu akan

disajikan hasil *algorithm* SmartPLS 3.2.9 yang dapat ditunjukkan pada gambar 4.2, yaitu:



Gambar 4.2 Hasil Algorithm SmartPLS 3.2.9

Berdasarkan hasil *algorithm* SmartPLS 3.2.9 maka akan disajikan hasil uji *outer model* yaitu :

Tabel 4.13. Besarnya nilai *outer loading* SmartPLS 3.2.9

	Akuntabilitas	Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money	Pengawasan	Sistem Pengendalian Intern	Transparansi
AK.1	0.826				
AK.2	0.824				
AK.3	0.913				
AK.4	0.876				
AK.5	0.819				
P.1			0.969		
P.2			0.978		
P.3			0.959		
S.1				0.913	
S.2				0.773	
S.3				0.922	
S.4				0.842	
S.5				0.743	
TR.1					0.948
TR.2					0.924
TR.3					0.947
V.1		0.927			
V.2		0.874			
V.3		0.875			

Sumber : Hasil Olahan data, 2025

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen melalui nilai *outer loading* menggunakan SmartPLS 3.2.9 yang mengindikasikan bahwa seluruh indikator pada masing-masing variabel

Validitas Konvergen (*Validity Convergent*)

Validitas konvergen merupakan bagian dari pengujian *outer model* yang bertujuan untuk memastikan bahwa indikator-indikator dalam satu konstruk benar-benar mengukur konsep yang sama. Dalam analisis menggunakan SmartPLS 3.2.9, validitas konvergen dievaluasi melalui dua alat analisis yaitu nilai *loading factor* dan *average variance extracted* (AVE). Nilai *loading factor* idealnya berada di atas 0,70 yang menunjukkan bahwa indikator memiliki kontribusi kuat terhadap konstruk yang diukur.

memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing indikator telah memenuhi kriteria validitas konvergen yang baik. Indikator pada variabel

Akuntabilitas (AK.1 sampai AK.5) memiliki nilai *loading* berkisar antara 0,819 hingga 0,913, yang berarti indikator tersebut secara konsisten mampu merepresentasikan konstruk Akuntabilitas.

Berdasarkan hasil uji validitas konvergen yang mengindikasikan bahwa seluruh konstruk dalam model penelitian ini telah menunjukkan validitas konvergen yang memadai, yang berarti bahwa masing-masing indikator memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variabel laten yang diwakilinya. Kemudian akan disajikan besarnya nilai AVE dari setiap konstruk yang diamati pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.14 yaitu:

Tabel 4.14. Besarnya nilai AVE SmartPLS 4

	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
Akuntabilitas	0.727
Transparansi	0.883
Pengawasan	0.939
Sistem Pengendalian Intern	0.709
Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money	0.796

Tabel 4.15. Validitas diskriminan dengan kriteria *fornell larcker*

	Akuntabilitas	Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money	Pengawasan	Sistem Pengendalian Intern	Transparansi
Akuntabilitas	0.852				
Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money	0.492	0.892			
Pengawasan	-0.161	0.091	0.969		
Sistem Pengendalian Intern	0.407	0.705	0.167	0.842	
Transparansi	0.134	0.254	-0.708	0.145	0.940

Sumber : Hasil olahan data, 2025

Sumber : Hasil olahan data, 2025

Hasil pengujian validitas konvergen melalui nilai *average variance extracted* (AVE) menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam model penelitian ini menunjukkan nilai AVE di atas 0,50 yang berarti telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Nilai AVE menunjukkan seberapa besar varians indikator yang dapat dijelaskan oleh konstruk yang bersangkutan, di mana ambang batas yang digunakan dikatakan indikator sudah memenuhi validitas konvergen adalah 0,50.

Uji Validitas Diskriminan (*discriminant validity*)

Validitas diskriminan perlu diuji untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model benar-benar berbeda secara makna. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk menilai apakah indikator suatu konstruk dapat mengukur konstruk tersebut dan tidak mencerminkan konstruk lain yang ada dalam model. Dengan demikian validitas diskriminan dapat memastikan bahwa setiap variabel dalam penelitian memiliki batas pengukuran yang jelas.

Berdasarkan hasil analisis validitas diskriminan menggunakan metode *forrell-larcker* dalam SmartPLS 3.2.9 yang sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.15 yang mengindikasikan bahwa secara umum seluruh konstruk dalam model telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Kriteria ini menyatakan bahwa validitas diskriminan tercapai apabila nilai akar kuadrat dari AVE (*average variance extracted*) yang terletak pada diagonal tabel yang lebih besar jika dibandingkan dengan korelasi antara konstruk tersebut dengan konstruk lainnya.

Selanjutnya konstruk transparansi memiliki nilai akar AVE sebesar 0.940 yang juga lebih besar dari semua korelasinya dengan konstruk lain. Dengan demikian, seluruh konstruk telah menunjukkan validitas diskriminan yang memadai sehingga hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing konstruk dapat dibedakan secara jelas satu sama lain dalam model penelitian ini. Kemudian akan disajikan pengukuran validitas diskriminan lainnya yakni rasio *heterotrait – monotrait* (HTMT) matriks yang dapat ditunjukkan pada tabel 4.16 yaitu :

Tabel 4.16. Matriks Rasio *Heterotrait-Monotrait* (HTMTM)

	Akuntabilitas	Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money	Pengawasan	Sistem Pengendalian Intern	Transparansi
Akuntabilitas					
Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money	0.548				
Pengawasan	0.180	0.126			
Sistem Pengendalian Intern	0.444	0.795	0.178		
Transparansi	0.143	0.268	0.748	0.193	

Sumber : Hasil Olahan Data, 2025

Berdasarkan hasil analisis validitas diskriminan menggunakan rasio *heterotrait-monotrait* (HTMT) dalam SmartPLS 3.2.9 ditunjukkan pada tabel 4.16 maka dapat dikatakan bahwa seluruh konstruk dalam model penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Menurut Ghazali (2023) bahwa nilai HTMT yang ideal adalah di bawah 0,90 (untuk model dengan konstruk yang berbeda secara teoritis) dan dalam beberapa kasus lebih konservatif lagi digunakan batas 0,85. Nilai HTMT yang tinggi mengindikasikan kurangnya diskriminasi antara dua konstruk, sedangkan nilai yang lebih rendah

menunjukkan bahwa konstruk memang berbeda satu sama lain.

Reliabilitas Konstruk

Reliabilitas konstruk berperan untuk mengukur apakah indikator yang digunakan telah memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten terhadap konstruk yang diamati pada penelitian ini. Dalam penerapan metode *partial least squares* (PLS) melalui aplikasi SmartPLS 3.2.9, uji reliabilitas umumnya dilakukan dengan mengacu pada kedua ukuran yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability* (CR). Adapun hasil pengujian reliabilitas konstruk dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 4.17 yaitu:

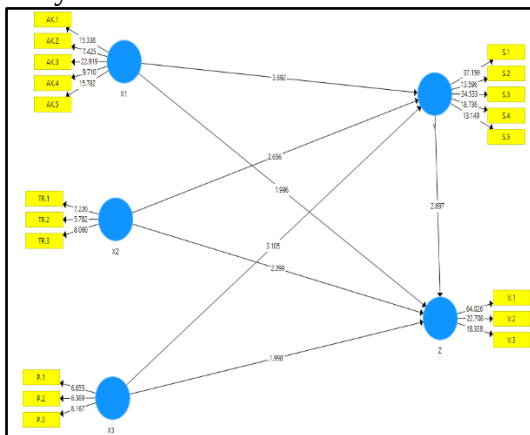
Tabel 4.17. Reliabilitas Konstruk

	Cronbach's Alpha	Keandalan Komposit (rho_c)
Akuntabilitas	0.906	0.930
Transparansi	0.936	0.958
Pengawasan	0.967	0.979
Sistem Pengendalian Intern	0.895	0.923
Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money	0.872	0.921

Sumber : Hasil Olahan Data, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas konstruk yang diperoleh melalui SmartPLS 3.2.9 yang mengindikasikan bahwa seluruh variabel dalam model penelitian ini yang telah memenuhi kriteria reliabilitas internal yang baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Sehingga secara umum yang mengindikasikan bahwa nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang disarankan adalah minimal 0,70 untuk menunjukkan reliabilitas yang memadai dan nilai di atas 0,80 menunjukkan reliabilitas yang sangat baik.

Sebelum dilakukan analisis pengujian hipotesis penelitian, terlebih dahulu akan disajikan hasil *bootstrapping* dalam SmartPLS 3.2.9 yang dapat disajikan melalui gambar 4.3 yaitu :

**Gambar 4.3. Hasil Bootstrapping dalam SmartPLS 3.2.9**

Gambar 4.3 yakni hasil *bootstrapping* melalui SmartPLS 3.2.9, selanjutnya akan dilakukan yakni analisis model struktural (*inner model*), yang mencakup pengujian hubungan antar konstruk laten dalam model. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel, dengan memperhatikan nilai koefisien jalur (*path coefficient*), nilai statistik-t, serta nilai p-value guna menentukan tingkat signifikansinya. Besarnya Nilai R^2 beserta Adjusted R^2 yang disajikan pada tabel 4.18 yaitu :

Tabel 4.18. Besarnya nilai R^2 dan nilai Adjusted R^2

	R^2	Adjusted R^2
Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money	0.607	0.572
Sistem Pengendalian Intern	0.352	0.309

Sumber : Hasil olahan data, 2025

Berdasarkan hasil analisis R^2 dan Adjusted R^2 menggunakan SmartPLS 3.2.9 yang sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.18 maka dapat dikatakan bahwa model struktural memiliki kemampuan prediktif yang cukup baik terhadap konstruk endogen yaitu kinerja anggaran berbasis *value for money* dan sistem pengendalian intern. Besarnya nilai Q^2 dapat disajikan melalui tabel 4.19 yaitu :

Tabel 4.19. Nilai Q-Square dalam Blindfolding SmartPLS 3.2.9

	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
Akuntabilitas	294.000	294.000	
Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money	147.000	82.814	0.436
Pengawasan	147.000	147.000	
Sistem Pengendalian Intern	245.000	191.369	0.225
Transparansi	147.000	147.000	

Sumber : Hasil olahan data, 2025

Kemudian akan disajikan hasil kecocokan model yang dapat ditunjukkan pada tabel 4.20 yaitu :

Tabel 4.20. Analisis Kecocokan Model (Model Fit)

	Model Saturated	Model Estimasi
SRMR	0.085	0.085
d_ULS	1.363	1.363
d_G	1.153	1.153
Chi-Square	273.930	279.930
NFI	0.732	0.732

Sumber : Hasil olahan data, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi model yaitu terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam menilai kecocokan model (*model fit*) yaitu *SRMR*, *d_ULS*, *d_G*, *Chi-square* dan *NFI*. Nilai *standardized root mean square residual* (*SRMR*) pada model jenuh maupun model perkiraan adalah sebesar 0.085, yang berada di bawah batas ambang

0.10 sehingga dapat dikatakan bahwa model ini telah memiliki kecocokan yang baik (*fit*) dengan data. *SRMR* yang rendah menunjukkan bahwa selisih antara matriks kovarians model dan data aktual relatif kecil.

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka dapat disajikan hasil pengujian hipotesis penelitian ini yakni pengaruh langsung (*Direct Effect*) dan pengaruh tidak langsung (*Indirect Effect*) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Apabila pengaruh yang ditunjukkan signifikan, maka hal ini dapat dijadikan dasar dalam menguji kebenaran hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Hasil pengujian terhadap pengaruh langsung antar konstruk dalam model ini selanjutnya disajikan pada Tabel 4.21 yaitu :

Tabel 4.21. Nilai Koefisien Jalur (Rata – rata, Stdev, Nilai -T, Nilai-ρ)

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	PValues
Akuntabilitas -> Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money	0.302	0.318	0.151	1.996	0.046
Akuntabilitas -> Sistem Pengendalian Intern	0.436	0.450	0.118	3.692	0.000
Pengawasan -> Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money	0.327	0.323	0.164	1.998	0.045
Pengawasan -> Sistem Pengendalian Intern	0.600	0.551	0.193	3.105	0.002
Sistem Pengendalian Intern -> Kinerja	0.473	0.454	0.175	2.697	0.007

Anggaran Berbasis Value For Money					
Transparansi -> Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money					
	0.376	0.365	0.164	2.299	0.022
Transparansi -> Sistem Pengendalian Intern					
	0.512	0.468	0.193	2.656	0.008

Sumber : Hasil olahan data, 2025

2) Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh langsung antar variabel yang dilakukan pula pengujian terhadap pengaruh tidak langsung (*indirect effect*). Pengujian ini difokuskan adalah untuk mengevaluasi peran sistem pengendalian intern sebagai variabel mediator pengaruh

akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja berbasis *value for money* pada kantor Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju. Adapun hasil pengujian pengaruh tidak langsung secara rinci, meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai t, dan nilai p (ρ) yang dapat dilihat pada Tabel 4.22 yaitu:

Tabel 4.22. Efek Tidak Langsung Spesifik (*Mean, Stdev, T-Values, P-Values*)

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	pValues
Akuntabilitas -> Sistem Pengendalian Intern -> Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money	0.206	0.205	0.102	2.029	0.043
Pengawasan -> Sistem Pengendalian Intern -> Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money	0.284	0.243	0.127	2.238	0.026
Transparansi -> Sistem Pengendalian Intern -> Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money	0.242	0.209	0.121	2.009	0.045

Sumber : Hasil olahan data, 2025

Tabel 4.22 yakni efek tidak langsung secara spesifik (Rata-rata, STDEV, Nilai T, Nilai ρ) yang diolah menggunakan SmartPLS 4 maka akan dilakukan analisis pengujian pengaruh tidak langsung yaitu :

Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja berbasis *value for money* pada kantor Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju Dimediasi oleh sistem pengendalian intern

Dalam hasil pengujian jalur menggunakan aplikasi smartpls 3.2.9 yang menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien jalur sebesar 0.206 hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan akuntabilitas sebesar 1 point maka akan meningkatkan sistem pengendalian intern sehingga memberikan dampak terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada kantor Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju sebesar 0.206 point. Sedangkan dilihat dari nilai tstatistik 2.029 yang lebih besar dari nilai t-tabel

1.96 dan nilai p value sebesar $0.023 < 0.05$ hal ini dapat membuktikan bahwa sistem pengendalian intern dapat memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada kantor Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju.

Pengaruh Transparansi terhadap kinerja berbasis *value for money* pada kantor Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju dimediasi oleh sistem pengendalian intern.

Hasil pengujian jalur menggunakan aplikasi SmartPLS 3.2.9 menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur antara variabel Akuntabilitas terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebesar 0.206. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas sebesar 1 poin maka akan meningkatkan sistem pengendalian intern sebesar 0.206 poin, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Kantor

Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju.

Pengaruh pengawasan terhadap kinerja berbasis *value for money* pada kantor Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju Dimediasi oleh sistem pengendalian intern

Hasil pengujian jalur menggunakan aplikasi SmartPLS 3.2.9 menunjukkan bahwa pengawasan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.274 terhadap sistem pengendalian intern. Ini berarti bahwa setiap peningkatan kualitas pengawasan sebesar 1 poin akan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern sebesar 0.274 poin. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Kantor Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju. Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka dapat disajikan ringkasan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini yang dapat ditunjukkan pada tabel 4.23 yaitu :

Tabel 4.23. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

No	Hipotesis penelitian	Nilai Koefisien Jalur			p value	Kesimpulan
		Direct Effect	Indirect Effect	Total Effect		
1	Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i>	0.302	-	0.302	0.046	Diterima
2	Pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i>	0.376	-	0.376	0.022	Diterima
3	Pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i>	0.327	-	0.327	0.046	Diterima
4	Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i>	0.473	-	0.473	0.007	Diterima
5	Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i> melalui sistem pengendalian intern	0.302	0.206	0.508	0.043	Diterima
6	Pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i>	0.376	0.242	0.618	0.045	Diterima

No	Hipotesis penelitian	Nilai Koefisien Jalur			pvalue	Kesimpulan
		Direct Effect	Indirect Effect	Total Effect		
	melalui sistem pengendalian intern					
7	Pengaruh Pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i> melalui sistem pengendalian intern	0.327	0.284	0.611	0.026	Diterima

Sumber : Hasil Olahan data, 2025

Pembahasan

Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju

Dari hasil analisis yang dilakukan mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*, sehingga dengan menggunakan software smartPLS 3.2.9 maka diperoleh hasil temuan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju. Hal ini memberikan arti bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan oleh Balai Pengelolaan DAS Karama dalam pengelolaan anggaran maka akan semakin baik pula kinerja anggaran berbasis *value for money*.

Pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju

Hasil analisis mengenai pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*, dimana dari hasil analisis koefisien jalur maka diperoleh temuan penelitian bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat

keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran maka akan semakin meningkat pula kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju. Dimana dengan adanya transparansi memungkinkan masyarakat maupun pemangku kepentingan internal dapat mengakses informasi terkait anggaran secara terbuka yang pada akhirnya dapat menciptakan kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran.

Pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan hasil analisis koefisien jalur dengan menggunakan software smartPLS 3.2.9 maka diperoleh hasil temuan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *value for money* sangat bergantung pada kualitas dan efektivitas pengawasan yang dilakukan. Dimana dengan adanya pengawasan yang efektif mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan, mendorong perbaikan berkelanjutan, dan menjamin bahwa proses anggaran berjalan sesuai rencana dan tujuan.

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*, dimana dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh temuan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi SPI maka kinerja anggaran akan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern yang mencakup unsur pemantauan, penilaian risiko, dan aktivitas pengendalian sangat menentukan keberhasilan implementasi anggaran yang berorientasi pada *value for money*.

Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* dimediasi sistem pengendalian intern pada Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju

Dari hasil pengujian jalur menggunakan aplikasi smartpls 3.2.9 yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* dimediasi sistem pengendalian intern. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem pengendalian intern dapat memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada kantor Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan akuntabilitas, seperti pelaporan yang konsisten, prosedur pertanggungjawaban yang jelas serta

kepatuhan terhadap regulasi maka akan mendorong pembentukan sistem pengendalian intern yang lebih kuat dan sistematis. Sistem pengendalian intern yang baik kemudian menjadi landasan dalam memastikan anggaran dikelola secara efisien, efektif, dan ekonomis, sebagaimana prinsip *value for money*. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya berdampak secara langsung terhadap perilaku organisasi, namun juga memperkuat mekanisme kontrol internal yang menjadi jembatan utama dalam pencapaian kinerja anggaran yang optimal.

Pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* dimediasi sistem pengendalian intern pada Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju

Berdasarkan hasil uji mediasi dengan menggunakan aplikasi smartpls 3.2.9 mengenai pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* dimediasi sistem pengendalian intern, maka diperoleh temuan penelitian bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* melalui sistem pengendalian intern. Dengan kata lain bahwa sistem pengendalian intern secara signifikan dapat memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Dari temuan ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan transparansi, yang meliputi pelaporan keuangan yang transparan, sistem pertanggungjawaban yang tertib serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan maka akan memperkuat struktur sistem pengendalian intern. Penguatan ini menciptakan mekanisme kontrol yang efektif dalam mengelola alokasi dan realisasi anggaran. Transparansi memiliki peran strategis tidak hanya

dalam mengatur perilaku birokrasi secara langsung tetapi juga dapat mendorong efektivitas sistem pengendalian yang menjadi penghubung antara kebijakan dan hasil sejalan dengan prinsip *value for money* yaitu efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam penggunaan anggaran.

Pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* dimediasi sistem pengendalian intern pada Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju

Hasil uji koefisien jalur dengan menggunakan aplikasi smartpls 3.2.9 mengenai pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* dimediasi sistem pengendalian intern, maka diperoleh temuan penelitian bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* melalui sistem pengendalian intern. Dengan kata lain bahwa sistem pengendalian intern secara signifikan dapat memediasi pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Hal ini dapat diindikasikan bahwa semakin kuat fungsi pengawasan yang diterapkan oleh pihak kepala kantor dan stafnya baik berupa pengawasan internal, eksternal, maupun partisipatif maka akan semakin optimal sistem pengendalian intern yang dijalankan oleh Balai Pengelolaan DAS Karama Kabupaten Mamuju.

PENUTUP Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yang dapat disajikan yaitu sebagai berikut , akuntabilitas terbukti memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan kinerja anggaran berbasis *value for money*. Transparansi berpengaruh dalam meningkatkan

kinerja anggaran berbasis *value for money*. Penyajian data serapan anggaran belanja pada BPDAS Karama yang terbuka dan dapat diakses baik oleh masyarakat maupun auditor, mampu meningkatkan transparansi serta menjamin akurasi dalam proses penyusunan anggaran. Pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan menyeluruh juga terbukti mendukung tercapainya kinerja anggaran yang optimal. Sistem pengendalian intern memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat pelaksanaan anggaran berbasis *value for money*. Akuntabilitas tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga secara tidak langsung meningkatkan kinerja anggaran melalui sistem pengendalian intern. Transparansi juga memberikan pengaruh terhadap kinerja anggaran dimediasi oleh sistem pengendalian intern. Keterbukaan dalam proses penyusunan anggaran, seperti melibatkan berbagai unit kerja dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), mempermudah pengawasan dan pengendalian sehingga realisasi anggaran lebih tepat sasaran. Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* dimediasi oleh sistem pengendalian intern sebagai mekanisme pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adia, V. R., & Susetyo, I. B. (2022). *Birokrasi dan Governansi Publik*. Lombok Tengah: Penerbit P4I.
- Amin, M., Maryadi, & Sjarlis, S. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Anggaran. *Nobel Management Review*, 3(3), 438–451.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*

- Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baswir, R. (2021). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Evaranus, K., & Wahidahwati. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran, Dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–23.
- Ghozali, I. (2023). *Partial Least Square Konsep, Tehnik dan Aplikasi Smartpls 4.0 Untuk Penelitian Empiris*. Yoga Pratama.
- Hawa, P., & Fitriasuri. (2024). Kinerja Anggaran Sektor Publik Berdasarkan Akuntabilitas, Partisipasi, Pengawasan dan Komitmen Organisasi. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 9(2), 143–159.
- Jatmiko, B., Haya, B. S., & Utami, T. P. (2022). Enhancing Value for Money Performance In Local Government Organizations: The Role Of Public Financial Accountability And Internal Control. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 245–259.
- Kurmanisah. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Batang. *Jurnal UIN*
- K.H. Abdurrahman Wahid *Pekalongan*.
- Lathifah. (2021). *Konsep Dan Praktik Sistem Pengendalian Internal*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Mahmudi. (2020). *Akuntansi Sektor Publik* (edisi pert). Yogyakarta : UII Press.
- Minhajuddin. (2023). *Pengendalian Internal dan Audit*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media.
- Noviantoro, A. T., & Jaeni. (2024a). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Desa Di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal). *Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 5, Tahun 2024, e-ISSN:2597-5234*.
- Noviantoro, A. T., & Jaeni. (2024b). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal). *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5), 717–729.
- Novrianti, D., Rusdarti, & Cahyaningdyah, D. (2022). Peran Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Kinerja Anggaran Pada Unit Kerja Universitas Negeri Semarang. *Business and Economic Analysis Journal*, 2(2), 121–133.

- Nurchotimah, A. S. I. (2021). *Pengawasan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Rachmadi, N. P., Oktarida, A., & Arifin, K. Z. (2023). Determinan Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(2), 188–196.
- Rahmani, T. N. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Good Government Governance Terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung. *Journal of Economics, Finance, and Social Science Review*, 1(1), 23–37.
- Ryandi, N. A., & Sari, R. P. (2024). The Influence of Accountability and Transparency on Public Trust in Villages Mediated by Internal Control Systems in Sidoarjo. *Dinasti International Journal Of Economics, Finance and Accounting*, 5(3), 916–931.
- Sari, P., Hanum, N., & Salman, M. (2021). Determinan Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money Pada Sektor Publik (Studi pada SKPD Aceh Tamiang). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(5), 294–303.
- Sarsiti. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*. Cirebon: CV. Green Publisher Indonesia.
- Sartono. (2022). *Fraud Auditing & Investigation/PDIC (Prevent, Detect, Investigation & Control)*. Palu: Faqih Publishing.
- Sawir, M. (2022). *Akuntabilitas Organisasi Publik (Konseptual dan Praktik)* (H. S. Marwiah (ed.)). Yogyakarta : Deepublish.
- Shara, Y., Ovami, D. C., & Humairah, R. (2020). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value For Money Padarsud Djoelham Binjai. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 13–17.
- Sinurat, N. A. M., Irawan, & Yuniarti, E. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus KSP XYZ). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(3), 224–232.
- Suci, R. C. E., & Rohman, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–15.
- Sudjono, A., & Setiawan, A. (2022). The Role of Supervision on Internal Control Disclosure. *Proceedings of the 3rd International Conference of Business, Accounting, and Economics*, 1–8.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Setiyawami). Alfabeta.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. Cendekia Press.
- Utami, H. R., & Haryati, T. (2023). Budgetary Goal Characteristics, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Dimoderasi Komitmen Organisasi. *Jambura Economic Education Journal*, 5(2), 100–111.
- Veronika, P., & Nugraeni. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for money. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol. 7 No. 3, 2023*.